

Workshop Penguatan Kapasitas Satgas PPKPT Bidang Investigasi dalam Penanganan Kasus Kekeraasan bagi Perguruan Tinggi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDikti Wilayah III

Yusuf Setyadi¹, Muhammad Dzaki Hamim²

^{1,2} Universitas Siber Asia Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: yusufsetyadi@lecturer.unsia.ac.id

ABSTRACT

Violence in higher education institutions is a critical issue that requires professional, systematic, victim-centered, and responsive mechanisms for prevention, investigation, and case management. The Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education (PPKPT) plays a strategic role in ensuring that reports of violence are addressed appropriately based on the principles of justice, confidentiality, non-discrimination, and protection and recovery of victims. This community service program aimed to strengthen the capacity and competence of PPKPT Task Forces, particularly in the field of investigation and the handling of violence cases at private higher education institutions under the coordination of LLDikti Region III. The program employed a participatory workshop approach consisting of expert presentations, interactive discussions, case studies, investigation simulations, problem identification, and participant evaluation. The training materials covered the fundamental principles of investigating violence cases, report intake and verification, information and evidence gathering techniques, interviews with victims and witnesses, case chronology development, victim protection, investigation ethics, and the formulation of case-handling recommendations. The results of the program demonstrated an improvement in participants' understanding of investigation procedures and the importance of applying objective, victim-sensitive, and regulatory-compliant approaches. The workshop also strengthened participants' ability to identify relevant facts, distinguish information from evidence, and systematically document investigation findings. This program is expected to contribute to strengthening the professionalism and institutional capacity of PPKPT Task Forces and to support the development of safe, inclusive, and violence-free higher education environments that uphold justice and protect all members of the academic community.

Keywords: PPKPT Task Force; Investigation; Violence; Higher Education

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
04.06.2026	01.05.2026	01.072026	07.08.2026

ABSTRACT

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan yang membutuhkan mekanisme pencegahan, penanganan, dan investigasi yang profesional, sistematis, berperspektif korban, serta berorientasi pada perlindungan dan pemulihan. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) memiliki peran strategis dalam memastikan setiap laporan kekerasan ditangani secara tepat berdasarkan prinsip keadilan, kerahasiaan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Satgas PPKPT, khususnya pada bidang investigasi dalam penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi swasta di bawah koordinasi LLDikti Wilayah III. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan workshop partisipatif yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi investigasi, identifikasi permasalahan, serta evaluasi pemahaman peserta. Materi kegiatan mencakup prinsip dasar investigasi kasus kekerasan, penerimaan dan verifikasi laporan, teknik pengumpulan informasi dan bukti, wawancara korban dan saksi, penyusunan kronologi kasus, perlindungan korban, etika investigasi, serta penyusunan rekomendasi penanganan kasus. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tahapan investigasi dan pentingnya penerapan prosedur yang objektif, sensitif terhadap korban, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Workshop juga memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi fakta, membedakan informasi dan bukti, serta menyusun dokumentasi hasil investigasi secara sistematis. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat profesionalisme Satgas PPKPT dan mendukung terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, bebas dari kekerasan, serta menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan bagi seluruh sivitas akademika.

Keywords: Satgas PPKPT; Investigasi; Kekerasan; Perguruan Tinggi

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
04.06.2026	01.05.2026	01.072026	07.08.2026

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
01.03.2026	01.05.2026	01.06.2026	15.08.2026

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan ruang akademik yang memiliki fungsi strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lingkungan perguruan tinggi idealnya menjadi ruang yang aman, inklusif, bermartabat, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Namun demikian, realitas di berbagai institusi pendidikan tinggi menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, maupun bentuk kekerasan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan sivitas akademika. Dampak kekerasan tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga dapat memengaruhi proses pembelajaran, produktivitas akademik, kesehatan sosial institusi, serta kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi (UNESCO, 2021).

Permasalahan kekerasan di perguruan tinggi memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan relasi sosial dan akademik yang beragam. Hubungan antara dosen dan mahasiswa, tenaga kependidikan dan mahasiswa, maupun antarmahasiswa dapat menciptakan dinamika kekuasaan yang berpotensi memengaruhi keberanian korban untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Dalam situasi tertentu, korban bahkan dapat mengalami ketakutan terhadap stigma, tekanan sosial, pembalasan, atau konsekuensi akademik maupun profesional. Oleh karena itu, mekanisme penanganan kekerasan tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan regulasi, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam menerima laporan, melakukan asesmen awal, melaksanakan investigasi, melindungi korban dan saksi, serta menyusun rekomendasi penanganan secara objektif dan bertanggung jawab (UNESCO, 2022).

Penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan menjadi semakin penting sejalan dengan agenda pembangunan pendidikan yang menempatkan keamanan, kesetaraan, inklusivitas, dan kesejahteraan sebagai bagian integral dari kualitas pendidikan. Lingkungan pendidikan yang aman merupakan salah satu prasyarat bagi terciptanya proses pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization menekankan bahwa kekerasan dan perundungan dalam lingkungan pendidikan dapat

memberikan konsekuensi terhadap kesejahteraan peserta didik, keterlibatan dalam proses pendidikan, serta pencapaian akademik (UNESCO, 2021). Dalam konteks perguruan tinggi, pendekatan tersebut perlu diperluas dengan membangun sistem kelembagaan yang mampu memberikan respons terhadap laporan kekerasan secara cepat, adil, rahasia, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Dalam konteks Indonesia, upaya menciptakan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari kekerasan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur sivitas akademika dan pengelola institusi. Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun sistem kelembagaan tersebut. Satgas tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga membutuhkan kapasitas substantif dalam melakukan pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan, melakukan pemeriksaan atau investigasi, serta memberikan rekomendasi penanganan kasus. Efektivitas Satgas sangat dipengaruhi oleh kemampuan anggota dalam memahami prosedur, etika, prinsip perlindungan korban, teknik komunikasi, pengumpulan informasi, dan dokumentasi kasus secara sistematis.

Investigasi merupakan salah satu tahapan penting dalam penanganan kasus kekerasan. Proses investigasi harus dilakukan secara hati-hati karena hasilnya dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan institusional. Investigasi yang tidak dilakukan secara profesional berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memahami fakta, memperburuk kondisi korban, mengabaikan hak terlapor, atau bahkan menghasilkan keputusan yang tidak adil. Sebaliknya, investigasi yang dilaksanakan secara objektif, transparan, proporsional, dan berbasis bukti dapat membantu institusi memperoleh gambaran kasus secara lebih komprehensif. Pendekatan investigasi juga perlu memperhatikan prinsip *do no harm*, terutama ketika berhadapan dengan korban yang mengalami trauma atau berada dalam posisi yang rentan (UN Women, 2022).

Kompetensi investigasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menemukan fakta, tetapi juga mencakup kemampuan membangun komunikasi yang aman dengan korban dan saksi. Proses wawancara, misalnya, harus dilakukan dengan memperhatikan sensitivitas terhadap pengalaman korban dan menghindari pertanyaan yang bersifat menyalahkan korban. Pendekatan yang berorientasi pada

korban (*victim-centered approach*) menjadi penting untuk memastikan bahwa proses penanganan tidak menghasilkan kekerasan sekunder. Organisasi internasional juga menekankan pentingnya sistem pelaporan dan respons yang aman, mudah diakses, rahasia, serta mampu memberikan dukungan kepada korban sepanjang proses penanganan kasus (UN Women, 2022).

Selain kompetensi individual, keberhasilan penanganan kasus juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan. Perguruan tinggi perlu memiliki prosedur operasional yang jelas mengenai penerimaan laporan, verifikasi informasi, asesmen risiko, investigasi, perlindungan korban dan saksi, pengambilan keputusan, serta mekanisme pemulihan. World Health Organization (2021) menegaskan bahwa sistem pencegahan dan respons terhadap kekerasan membutuhkan pendekatan kelembagaan yang terintegrasi, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem rujukan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Prinsip tersebut relevan diterapkan dalam penguatan Satgas PPKPT agar penanganan kasus tidak bergantung pada kemampuan personal anggota, tetapi menjadi bagian dari sistem kelembagaan yang berkelanjutan.

Perguruan tinggi swasta yang berada di bawah koordinasi LLDikti Wilayah III memiliki karakteristik kelembagaan yang beragam. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia, struktur organisasi, pengalaman dalam penanganan kasus, serta mekanisme internal dapat memengaruhi kesiapan masing-masing perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi Satgas PPKPT. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya forum penguatan kapasitas yang memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, berbagi pengalaman, diskusi kasus, dan penyamaan pemahaman antarsatuan tugas. Workshop antarperguruan tinggi menjadi salah satu strategi yang relevan karena tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga memungkinkan peserta mempraktikkan tahapan investigasi melalui studi kasus dan simulasi.

Penguatan kapasitas melalui pelatihan dan workshop merupakan pendekatan yang penting dalam meningkatkan kompetensi organisasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat mendorong terbentuknya pemahaman yang lebih beragam mengenai prosedur penanganan kasus dan meningkatkan kesiapan institusi dalam menghadapi persoalan kekerasan. Dalam konteks pendidikan tinggi, peningkatan kapasitas juga perlu diarahkan pada pembentukan budaya

kelembagaan yang mendorong pelaporan, memberikan perlindungan kepada korban, serta memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan tidak diskriminatif (UNESCO, 2023). Dengan demikian, workshop tidak hanya dipandang sebagai kegiatan transfer pengetahuan, tetapi sebagai bagian dari proses penguatan tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Perkembangan kebijakan dan praktik penanganan kekerasan dalam pendidikan juga menunjukkan pentingnya pendekatan yang komprehensif. Pencegahan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan institusi dalam memberikan respons ketika kasus terjadi. Sistem yang hanya berorientasi pada pencegahan tanpa mekanisme investigasi yang kuat berpotensi kehilangan efektivitas ketika menghadapi laporan konkret. Sebaliknya, mekanisme investigasi tanpa strategi pencegahan yang baik juga tidak cukup untuk menciptakan perubahan budaya organisasi. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas Satgas PPKPT bidang investigasi perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu membangun ekosistem perguruan tinggi yang aman, berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan seluruh sivitas akademika (UNESCO, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Workshop Penguatan Kapasitas Satgas PPKPT Bidang Investigasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDikti Wilayah III menjadi relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota Satgas dalam melakukan investigasi kasus kekerasan secara sistematis, objektif, etis, dan berperspektif korban. Workshop juga menjadi ruang untuk memperkuat kemampuan peserta dalam menerima laporan, melakukan verifikasi awal, mengidentifikasi fakta, mengumpulkan informasi dan bukti, melakukan wawancara, menyusun kronologi, mendokumentasikan hasil investigasi, serta merumuskan rekomendasi penanganan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas individual sekaligus penguatan kelembagaan Satgas PPKPT pada perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDikti Wilayah III. Peningkatan kompetensi tersebut pada akhirnya diharapkan mampu mendukung terciptanya mekanisme penanganan kasus yang lebih profesional, cepat, adil, rahasia, dan berorientasi pada perlindungan korban. Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi

terhadap pembentukan budaya akademik yang menghargai martabat manusia, menjunjung kesetaraan, mencegah kekerasan, dan menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman serta kondusif bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Workshop Penguatan Kapasitas Satgas PPKPT Bidang Investigasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDikti Wilayah III. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif yang menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses peningkatan kapasitas. Peserta kegiatan merupakan anggota Satgas PPKPT dari berbagai perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDikti Wilayah III yang memiliki tanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan partisipatif dipilih karena peningkatan kapasitas akan lebih efektif apabila peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mendiskusikan pengalaman, mengidentifikasi permasalahan, dan melakukan praktik penanganan kasus berdasarkan kondisi yang dihadapi di institusi masing-masing (UNESCO, 2021). Kegiatan dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai prinsip investigasi, etika penanganan kasus, perlindungan korban, kerahasiaan informasi, serta pentingnya penerapan prosedur yang objektif dan tidak diskriminatif.

Tahap pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan dan pemetaan kompetensi peserta. Tahapan ini dilakukan melalui diskusi awal, penggalian pengalaman peserta, serta identifikasi berbagai kendala yang dihadapi Satgas PPKPT dalam menerima dan menangani laporan kekerasan. Pemetaan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan materi workshop agar sesuai dengan kebutuhan praktis peserta. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi oleh narasumber yang memiliki kompetensi pada bidang penanganan kekerasan, investigasi, perlindungan korban, dan tata kelola perguruan tinggi. Materi mencakup pemahaman mengenai bentuk dan karakteristik kekerasan, mekanisme penerimaan laporan, verifikasi informasi, asesmen awal, teknik pengumpulan fakta dan bukti,

wawancara korban maupun saksi, penyusunan kronologi, dokumentasi hasil investigasi, serta penyusunan rekomendasi penanganan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa sistem respons terhadap kekerasan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan memadai (WHO, 2021; UN Women, 2022).

Tahap berikutnya menggunakan studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi investigasi. Peserta diberikan ilustrasi kasus kekerasan yang memiliki karakteristik berbeda untuk dianalisis berdasarkan perspektif Satgas PPKPT. Dalam proses tersebut, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi fakta, menentukan informasi yang perlu diverifikasi, menyusun pertanyaan wawancara, mengidentifikasi pihak yang relevan, menyusun kronologi kejadian, serta menentukan bentuk dokumentasi yang diperlukan. Simulasi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dengan korban dan saksi dengan tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan, keamanan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap korban. Penggunaan metode praktik dan simulasi dimaksudkan agar peserta mampu menghubungkan pengetahuan normatif dengan persoalan nyata yang mungkin muncul dalam pelaksanaan tugas Satgas. Pendekatan berbasis praktik penting dalam penguatan kapasitas karena memungkinkan peserta memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan prosedur dan mengambil keputusan secara sistematis (UNESCO, 2023).

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengukur perubahan pemahaman dan kesiapan peserta setelah mengikuti workshop. Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif, tanya jawab, analisis hasil studi kasus, serta penilaian terhadap kemampuan peserta dalam menyelesaikan simulasi investigasi. Aspek yang dievaluasi meliputi pemahaman terhadap tahapan investigasi, kemampuan mengidentifikasi fakta dan bukti, kemampuan melakukan komunikasi dengan korban dan saksi, penerapan prinsip perlindungan korban, serta kemampuan menyusun hasil investigasi secara sistematis. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi aspek kompetensi yang telah berkembang maupun bagian yang masih memerlukan penguatan. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari tingkat pemahaman teoritis, tetapi juga dari kemampuan peserta menerapkan pengetahuan dalam konteks penanganan kasus kekerasan di perguruan tinggi. Model evaluasi dan penguatan kapasitas secara

berkelanjutan diharapkan dapat mendukung terbentuknya mekanisme PPKPT yang profesional, responsif, dan berorientasi pada terciptanya lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan inklusif (UNESCO, 2024; UN Women, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi Satgas PPKPT dalam Investigasi Kasus Kekerasan

Pelaksanaan Workshop Penguatan Kapasitas Satgas PPKPT Bidang Investigasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDikti Wilayah III menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang efektif. Kegiatan workshop memberikan ruang bagi peserta untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Satgas PPKPT, khususnya dalam menangani laporan yang membutuhkan proses investigasi. Sebelum mengikuti kegiatan, pemahaman peserta mengenai investigasi kasus kekerasan cenderung beragam karena dipengaruhi oleh pengalaman kelembagaan, latar belakang keilmuan, serta intensitas keterlibatan masing-masing anggota dalam penanganan kasus. Melalui penyampaian materi dan diskusi, peserta memperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai tahapan investigasi mulai dari penerimaan laporan, verifikasi awal, identifikasi pihak yang terlibat, pengumpulan informasi, wawancara, dokumentasi, analisis fakta, sampai dengan penyusunan rekomendasi. Penguatan kapasitas tersebut penting karena kualitas respons institusi terhadap kekerasan sangat ditentukan oleh kompetensi pihak yang menerima dan memproses laporan (UNESCO, 2021).

Salah satu hasil penting dari kegiatan adalah meningkatnya kesadaran peserta bahwa investigasi tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pencarian kesalahan atau penentuan pihak yang dianggap bersalah. Investigasi harus ditempatkan sebagai proses pencarian dan verifikasi fakta secara objektif sehingga keputusan yang dihasilkan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks penanganan kekerasan di perguruan tinggi, proses tersebut membutuhkan kehati-hatian karena informasi yang diperoleh dapat

berkaitan dengan pengalaman traumatis, relasi kuasa, reputasi individu, serta keberlanjutan kehidupan akademik korban maupun pihak terlapor. Peserta workshop memperoleh pemahaman bahwa setiap informasi yang diterima perlu diverifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis berdasarkan relevansinya dengan kasus. Pemahaman ini menjadi penting untuk menghindari keputusan yang hanya didasarkan pada asumsi, persepsi, atau informasi yang belum teruji. Pendekatan berbasis fakta dan bukti merupakan bagian penting dalam membangun mekanisme penanganan kekerasan yang adil dan dapat dipercaya (UN Women, 2022).



Gambar 1 Foto Bersama Narasumber dengan Penyelenggara Politeknik Sahid I-LLDikti Wilayah 3

Workshop juga memperkuat kemampuan peserta dalam membedakan antara laporan, informasi, fakta, dan bukti. Dalam proses investigasi, laporan korban merupakan titik awal yang penting, tetapi tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai keseluruhan fakta kasus. Satgas perlu melakukan proses klarifikasi dengan tetap menghormati pengalaman korban dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan tekanan tambahan. Peserta diarahkan untuk memahami bahwa proses klarifikasi bukanlah upaya untuk meragukan korban, melainkan bagian dari mekanisme untuk memperoleh gambaran kasus secara utuh. Oleh sebab itu, teknik komunikasi yang digunakan harus menghindari pertanyaan yang menyudutkan, menyalahkan, atau menghakimi korban. Pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi prinsip penting agar proses investigasi tidak menghasilkan kekerasan sekunder (WHO, 2021).

Peningkatan kompetensi juga terlihat dalam kemampuan peserta memahami pentingnya dokumentasi investigasi. Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi proses dan memastikan bahwa setiap tahapan penanganan memiliki rekam jejak yang jelas. Peserta memahami pentingnya mencatat tanggal dan waktu laporan, kronologi, identitas pihak yang relevan, hasil wawancara, dokumen pendukung, serta proses pengambilan keputusan secara sistematis. Dokumentasi yang baik juga mendukung proses monitoring dan evaluasi internal serta membantu institusi dalam mempertanggungjawabkan proses penanganan apabila terjadi evaluasi lebih lanjut. Penguatan sistem dokumentasi merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan yang diperlukan dalam membangun mekanisme respons terhadap kekerasan yang transparan dan akuntabel (UNESCO, 2023).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa workshop tidak hanya meningkatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang peserta terhadap investigasi. Investigasi dipahami sebagai proses profesional yang membutuhkan objektivitas, kehati-hatian, kerahasiaan, integritas, dan sensitivitas terhadap kondisi korban. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan lingkungan pendidikan yang aman membutuhkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia yang mampu memberikan respons secara tepat ketika terjadi kasus kekerasan (UNESCO, 2024). Dengan demikian, penguatan kompetensi Satgas PPKPT bidang investigasi menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Penguatan Pendekatan Investigasi yang Berperspektif Korban dan Berbasis Bukti

Hasil pelaksanaan workshop menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya mengintegrasikan pendekatan berperspektif korban dengan prinsip investigasi berbasis bukti. Kedua pendekatan tersebut tidak seharusnya dipertentangkan. Pendekatan berperspektif korban memberikan perhatian terhadap keamanan, martabat, kebutuhan, dan kondisi psikologis korban, sedangkan investigasi berbasis bukti memastikan bahwa proses penanganan tetap dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi keduanya diperlukan agar Satgas

PPKPT mampu memberikan perlindungan kepada korban tanpa mengabaikan prinsip keadilan dalam proses pemeriksaan. Dalam praktiknya, peserta diarahkan untuk memahami bahwa korban harus memperoleh ruang yang aman untuk menyampaikan pengalaman tanpa tekanan, sementara informasi yang diberikan tetap perlu dikaji secara sistematis sesuai dengan prosedur investigasi (UN Women, 2022).



Gambar 2 Suasana workshop Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKPT) Di Aula Politeknik Sahid Pariwisata

Diskusi dan studi kasus dalam workshop memperlihatkan bahwa salah satu tantangan utama penanganan kasus kekerasan adalah membangun komunikasi yang tepat dengan korban. Korban dapat mengalami ketakutan, kecemasan, rasa malu, tekanan sosial, atau kekhawatiran terhadap dampak laporan terhadap status akademik dan hubungan sosialnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan korban dalam menceritakan peristiwa secara runtut. Oleh karena itu, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan situasi wawancara yang aman, memberikan informasi mengenai proses yang akan dilakukan, menjaga kerahasiaan, dan memberikan kesempatan kepada korban untuk menjelaskan pengalaman dengan caranya sendiri. Prinsip tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk membangun sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses sehingga korban tidak merasa bahwa proses pelaporan justru menjadi sumber tekanan baru (WHO, 2021).

Dalam simulasi wawancara, peserta juga dilatih untuk menyusun pertanyaan yang bersifat terbuka dan relevan. Pertanyaan tidak diarahkan untuk menyalahkan korban, tetapi untuk memperoleh informasi mengenai apa yang terjadi, kapan dan di mana peristiwa berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta apakah terdapat saksi atau dokumen pendukung. Pendekatan tersebut membantu Satgas memperoleh informasi yang lebih komprehensif sekaligus mengurangi risiko terjadinya *victim blaming*. Peserta memahami bahwa penggunaan bahasa dan cara bertanya dapat memengaruhi kualitas informasi yang diperoleh. Dalam konteks penanganan kekerasan, sensitivitas komunikasi menjadi bagian dari profesionalisme investigator karena proses investigasi dapat memengaruhi kondisi psikologis korban (UNESCO, 2022).

Selain aspek korban, workshop menekankan pentingnya pengumpulan dan verifikasi bukti. Bukti dalam kasus kekerasan dapat berupa dokumen, pesan elektronik, rekaman komunikasi, informasi digital, keterangan saksi, maupun bentuk informasi lain yang relevan dengan kasus. Peserta diarahkan untuk tidak langsung menarik kesimpulan berdasarkan satu sumber informasi, tetapi melakukan pemeriksaan silang terhadap informasi yang tersedia. Prinsip *triangulation* dapat digunakan untuk memperkuat validitas informasi dengan membandingkan keterangan korban, saksi, dokumen, dan sumber informasi lain yang relevan. Pendekatan semacam ini dapat meningkatkan objektivitas investigasi sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam memahami kasus. Sistem penanganan kekerasan yang kuat membutuhkan prosedur pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan yang sistematis (UNESCO, 2023).

Pembahasan mengenai kerahasiaan juga menjadi salah satu aspek penting dalam workshop. Informasi mengenai korban, saksi, maupun pihak terlapor perlu dikelola secara hati-hati untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak diperlukan. Kebocoran informasi dapat menimbulkan stigma, tekanan sosial, konflik antarpihak, bahkan dapat menghambat proses investigasi. Oleh sebab itu, peserta memahami bahwa prinsip kerahasiaan tidak hanya berlaku pada hasil akhir investigasi, tetapi juga sepanjang proses penerimaan laporan, wawancara, pengumpulan bukti, rapat internal, hingga penyusunan rekomendasi. Perlindungan data dan informasi menjadi bagian dari

sistem perlindungan korban yang harus diperhatikan oleh setiap anggota Satgas (UN Women, 2023).

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pendekatan berperspektif korban memberikan dimensi penting bagi profesionalisme Satgas PPKPT. Profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan proses investigasi, tetapi juga dari kemampuan memastikan bahwa proses tersebut tidak menimbulkan dampak negatif tambahan bagi korban. Hal ini sejalan dengan perkembangan pendekatan internasional yang menempatkan keselamatan, martabat, dan hak korban sebagai bagian penting dalam sistem respons terhadap kekerasan (UNESCO, 2024). Dengan demikian, workshop berhasil memperkuat pemahaman peserta bahwa investigasi yang berkualitas adalah investigasi yang mampu menyeimbangkan kebutuhan perlindungan korban, objektivitas, kerahasiaan, dan penggunaan bukti secara proporsional.

Penguatan Tata Kelola dan Kolaborasi Antarperguruan Tinggi dalam Penanganan Kekerasan

Temuan lain dari kegiatan workshop adalah menguatnya kesadaran peserta mengenai pentingnya tata kelola kelembagaan dan kolaborasi antarperguruan tinggi dalam penanganan kasus kekerasan. Perbedaan pengalaman dan kapasitas masing-masing perguruan tinggi menunjukkan bahwa tidak semua Satgas PPKPT memiliki tingkat kesiapan yang sama. Sebagian institusi telah memiliki pengalaman menangani laporan, sementara institusi lain masih berada pada tahap membangun mekanisme internal. Forum workshop antarperguruan tinggi memberikan kesempatan bagi peserta untuk saling bertukar pengalaman mengenai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi Satgas. Proses pertukaran pengalaman tersebut memperkaya perspektif peserta dan mendorong munculnya pemahaman bahwa penanganan kekerasan membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat, bukan hanya kemampuan individual anggota Satgas.

Diskusi antarpeserta memperlihatkan adanya sejumlah tantangan dalam pelaksanaan fungsi Satgas, antara lain keterbatasan pemahaman prosedur, kesulitan dalam menentukan tahapan investigasi, pengelolaan informasi yang sensitif, komunikasi dengan korban dan saksi, serta koordinasi dengan unsur pimpinan perguruan tinggi. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa Satgas membutuhkan dukungan kebijakan

internal, sumber daya manusia, sarana pendukung, dan prosedur operasional yang jelas. WHO (2021) menjelaskan bahwa sistem respons terhadap kekerasan yang efektif membutuhkan pendekatan multisektor dan kelembagaan yang memungkinkan adanya koordinasi antara berbagai aktor. Dalam konteks perguruan tinggi, koordinasi tersebut dapat melibatkan pimpinan, Satgas, unit akademik, unit kemahasiswaan, konselor, layanan kesehatan, serta pihak lain sesuai kebutuhan kasus.



Gambar 6 Foto Penyerahan Sertifikat Dari LLDikti Wil 3 Kepada Narasumber Di Aula Politeknik Sahid Pariwisata

Workshop juga menghasilkan pemahaman bahwa keberadaan Satgas PPKPT perlu didukung oleh mekanisme kerja yang jelas. Mekanisme tersebut setidaknya mencakup jalur penerimaan laporan, mekanisme asesmen awal, prosedur investigasi, perlindungan korban dan saksi, pengelolaan dokumen, penyusunan rekomendasi, serta monitoring tindak lanjut. Kejelasan prosedur akan membantu mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas dan memastikan bahwa setiap laporan memperoleh perlakuan yang konsisten. Tata kelola yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan sivitas akademika terhadap Satgas karena masyarakat kampus mengetahui ke mana harus melapor dan bagaimana laporan tersebut akan diproses. Sistem yang mudah diakses, aman, dan responsif merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan (UNESCO, 2022).

Kolaborasi antarperguruan tinggi juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan kapasitas. Melalui forum bersama, Satgas dapat membangun jejaring komunikasi untuk berbagi pengalaman, metode, perangkat kerja, dan praktik baik. Kolaborasi tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk forum berkala, pelatihan lanjutan, diskusi kasus secara terbatas, serta pengembangan materi edukasi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan. Model jejaring semacam ini dapat membantu perguruan tinggi menghadapi persoalan yang memiliki karakteristik serupa sekaligus mendorong terbentuknya standar kompetensi yang lebih seragam. UNESCO (2023) menekankan bahwa pembangunan lingkungan pendidikan yang aman membutuhkan pendekatan berkelanjutan yang melibatkan penguatan kapasitas, koordinasi, serta evaluasi secara berkala.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan workshop menunjukkan bahwa transfer pengetahuan kepada Satgas PPKPT dapat memberikan manfaat yang lebih luas karena peserta merupakan bagian dari institusi yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap keamanan lingkungan perguruan tinggi. Peningkatan kapasitas anggota Satgas memiliki potensi untuk diteruskan melalui kegiatan internal di masing-masing perguruan tinggi. Peserta yang telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama workshop dapat berperan sebagai agen penguatan kapasitas di institusinya masing-masing melalui sosialisasi, penyusunan prosedur internal, simulasi penanganan kasus, dan penguatan mekanisme pelaporan. Dengan demikian, dampak kegiatan tidak berhenti pada peserta workshop, tetapi dapat berkembang menjadi proses penguatan kelembagaan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, hasil workshop menunjukkan bahwa penguatan kapasitas Satgas PPKPT bidang investigasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kompetensi investigasi tidak dapat dibangun hanya melalui satu kegiatan pelatihan, tetapi membutuhkan pembelajaran berkelanjutan, evaluasi pengalaman penanganan kasus, pembaruan pemahaman terhadap kebijakan, serta pengembangan jejaring kelembagaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *continuous capacity building* yang menempatkan pengembangan kompetensi sebagai proses jangka panjang (UNESCO, 2024). Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dikembangkan melalui pelatihan lanjutan yang lebih spesifik, misalnya teknik wawancara investigatif, pengelolaan bukti

digital, penyusunan laporan investigasi, perlindungan korban, manajemen risiko, serta mekanisme rujukan.

Dengan demikian, workshop tidak hanya memberikan peningkatan pengetahuan teknis mengenai investigasi, tetapi juga memperkuat kesadaran peserta mengenai pentingnya membangun sistem kelembagaan yang terintegrasi. Satgas PPKPT yang memiliki kompetensi, prosedur kerja yang jelas, dukungan pimpinan, serta jejaring kolaborasi antarperguruan tinggi akan lebih mampu menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan secara profesional. Penguatan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat membangun lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, berkeadilan, dan menghargai martabat seluruh sivitas akademika. Upaya tersebut sejalan dengan agenda global untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi serta mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan (UNESCO, 2025; UN Women, 2026).

SIMPULAN

Kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas Satgas PPKPT Bidang Investigasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan LLDikti Wilayah III menunjukkan bahwa penguatan kompetensi sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam membangun mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan yang profesional, objektif, dan berorientasi pada perlindungan korban. Workshop memberikan peningkatan pemahaman peserta mengenai tahapan investigasi, mulai dari penerimaan laporan, verifikasi informasi, pengumpulan fakta dan bukti, wawancara korban dan saksi, penyusunan kronologi, dokumentasi, hingga perumusan rekomendasi penanganan kasus. Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman Satgas PPKPT mengenai pentingnya menerapkan pendekatan yang berperspektif korban, menjaga kerahasiaan informasi, menghindari *victim blaming*, serta memastikan proses investigasi dilakukan secara objektif dan berbasis bukti. Melalui studi kasus, diskusi, dan simulasi, peserta memperoleh pengalaman praktis dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi muncul dalam proses penanganan kasus kekerasan. Hal tersebut menjadi modal penting bagi Satgas dalam

memberikan respons yang lebih aman, adil, sensitif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas selesainya artikel ilmiah program PKM ini. Terimakasih juga kepada para pihak yang berkontribusi pada pengabdian ini.

REFERENSI

- International Labour Organization. (2022). *Violence and harassment in the world of work: A guide on Convention No. 190 and Recommendation No. 206*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. (2024). *Safe and healthy working environments: Fundamental principles and rights at work*. Geneva: ILO.
- UN Women. (2021). *Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19*. New York: UN Women.
- UN Women. (2022). *Handbook for national action plans on violence against women*. New York: UN Women.
- UN Women. (2023). *Gender-responsive approaches to violence prevention and response*. New York: UN Women.
- UN Women. (2024). *Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2024*. New York: UN Women.
- UN Women. (2025). *Gender equality and violence prevention: Global progress and priorities*. New York: UN Women.
- UN Women. (2026). *Global perspectives on preventing and responding to violence against women and girls*. New York: UN Women.
- UNESCO. (2021). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2022). *Transforming education: An urgent political imperative*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2023). *Education for sustainable development: A roadmap*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

- UNESCO. (2024). *Global education monitoring report 2024: Gender report—Technology on her terms*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2025). *Global education monitoring report 2025: Education and technology*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2026). *Global education monitoring report 2026*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- United Nations. (2021). *Sustainable Development Goals Report 2021*. New York: United Nations.
- United Nations. (2022). *Transforming education: Thematic action track on inclusive, equitable, safe and healthy schools*. New York: United Nations.
- United Nations. (2023). *Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: United Nations.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2022). *RESPECT women: Preventing violence against women—Implementation package*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2024). *Violence against women: Evidence and prevention strategies*. Geneva: WHO.